

**KAJIAN PENDEKATAN EKOSISTEM
DALAM PENGELOLAAN PERIKANAN DI WILAYAH PENGELOLAAN
PERIKANAN (WPP) 571 SELAT MALAKA PROVINSI SUMATERA UTARA**

M. Ridha S. Damanik¹, M. Riza Kurnia Lubis², Anik Juli Dwi Astuti³

^{1,3}Jurusan Pendidikan Geografi, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Medan, Jl. Willem Iskandar Psr. V Medan Estate 20221 Sumatera Utara, Indonesia

²Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Utara, Jl. Sei Batuginggung No. 6 Medan, Sumatera Utara 25128

Email: mridhadamanik@unimed.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi potensi perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara serta memberikan gambaran kondisi sumberdaya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan menggunakan content analysis, di mana kajian difokuskan pada isi (content) keragaan pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dengan mengacu kepada kriteria indikator. Indikator yang digunakan adalah indikator habitat, indikator sumberdaya ikan, indikator teknis penangkapan ikan, indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator kelembagaan. Analisis data dilakukan dengan menggunakan multi-criteria analysis (MCA) di mana sebuah set kriteria dibangun sebagai basis bagi analisis keragaan wilayah pengelolaan perikanan yang sdilihat dari pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan melalui pengembangan indeks komposit. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 6 indikator yang dinilai, terdapat 3 indikator yang termasuk dalam kriteria baik yaitu indikator habitat, indikator sumberdaya ikan, dan indikator sosial, dengan nilai komposit masing-masing 213, 214 dan 233. Selanjutnya terdapat 2 indikator yang termasuk dalam kriteria sedang yaitu indikator teknis penangkapan ikan dan indikator kelembagaan, dengan nilai komposit masing-masing 183 dan 167. Sedangkan untuk indikator ekonomi termasuk dari kategori buruk dengan nilai komposit 125. Berdasarkan perhitungan agregat komposit seluruh indikator maka nilai rata-rata komposit adalah 189 atau termasuk dalam kategori sedang.

Kata Kunci : Pendekatan Ekosistem, Pengelolaan Perikanan

Abstract

This study aims to identify potential fisheries in the fishery management area (WPP) 571 Malacca Strait North Sumatra province and provide an overview of the condition of fishery resources in the fishery management area (WPP) 571 Malacca Strait North Sumatra Province. This research is a qualitative descriptive study using an ecosystem approach to fisheries management. The ecosystem approach to fisheries management is done by using content analysis, in which the study is focused on the content (content) variability in the fisheries management fisheries management area (WPP) with reference to the indicator criteria. The indicator used is the habitat indicator, the indicator fish resources, fishing technical indicators, economic indicators, social indicators, and institutional indicators. Data analysis was

performed using a multi-criteria analysis (MCA) in which a set of established criteria as a basis for variability analysis of the fishery management area sdlihat of the ecosystem approach in fisheries management through the development of a composite index. The results of this study showed that of the six indicators were assessed, there are three indicators that are included in both criteria are indicators of habitat, an indicator of fish resources, and social indicators, with a composite score of each 213, 214 and 233. Then there are two indicators that are included in criterion was that the technical indicators and indicators of institutional fishing, with a composite score of each 183 and 167. As for economic indicators including the poor category with a composite score of 125. Based on the calculation of the entire aggregate composite indicator of the average composite score is 189 or including the classes of being.

Keywords: Ecosystem Approach, Management of Fisheries

PENDAHULUAN

Secara alamiah, pengelolaan sistem perikanan tidak dapat dilepaskan dari tiga dimensi yang tidak terpisahkan satu sama lain yaitu (1) *dimensi sumberdaya perikanan dan ekosistemnya*; (2) *dimensi pemanfaatan sumberdaya perikanan untuk kepentingan sosial ekonomi masyarakat*; dan (3) *dimensi kebijakan perikanan itu sendiri* (Charles, 2001). Terkait dengan tiga dimensi tersebut, pengelolaan perikanan saat ini masih belum mempertimbangkan keseimbangan ketiganya, di mana kepentingan pemanfaatan untuk kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dirasakan lebih besar dibanding dengan misalnya kesehatan ekosistemnya. Dengan kata lain, pendekatan yang dilakukan masih parsial belum terintegrasi dalam sebuah batasan ekosistem yang menjadi wadah dari sumberdaya ikan sebagai target pengelolaan. Dalam konteks ini lah, pendekatan terintegrasi melalui pendekatan ekosistem terhadap pengelolaan perikanan (*ecosystem approach to fisheries*) menjadi sangat penting.

Dalam konstelasi kebijakan pengelolaan perikanan di Indonesia, wilayah perairan laut Indonesia dibagi menjadi 11 (sebelas) Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) yang terbentang dari wilayah Selat Malaka di sebelah barat Indonesia hingga Laut Arafura di sebelah timur Indonesia.

Wilayah Pengelolaan Perikanan ini merupakan basis bagi tata kelola perikanan (fisheries governance) Indonesia yang diharapkan dapat menjadi kawasan implementasi pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Perikanan dengan pendekatan ekosistem yang mengadopsi kebutuhan ketiga dimensi untuk keberlanjutan sumberdaya dan kesejahteraan masyarakat pesisir. Salah Satu WPP yang terdapat di wilayah pantai timur sumatera adalah WPP 571 yang mencakup selat malaka dan Laut Andaman.

Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Selat Malaka ini unik karena secara yuridis, perikanan ini berada dibawah dua negara, yaitu Indonesia dan Malaysia sehingga dalam pengelolaan perikanan ini menjadi tanggung jawab bersama (terutama untuk stok ikan yang bersifat straddling and shared). Dangkalan (*continental shelf*) di Selat Malaka umumnya berproduktifitas tinggi, wilayah padat nelayan, aktivitas eksploitasi sumberdaya ikan (SDI) dilakukan secara intensif baik oleh nelayan konvensional maupun modern. Pada Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) 571 wilayah Indonesia, yang berkembang adalah perikanan demersal (termasuk udang) dan pelagis kecil hanya sebagian kecil dan terdapat perikanan pelagis besar di bagian Barat Laut dekat

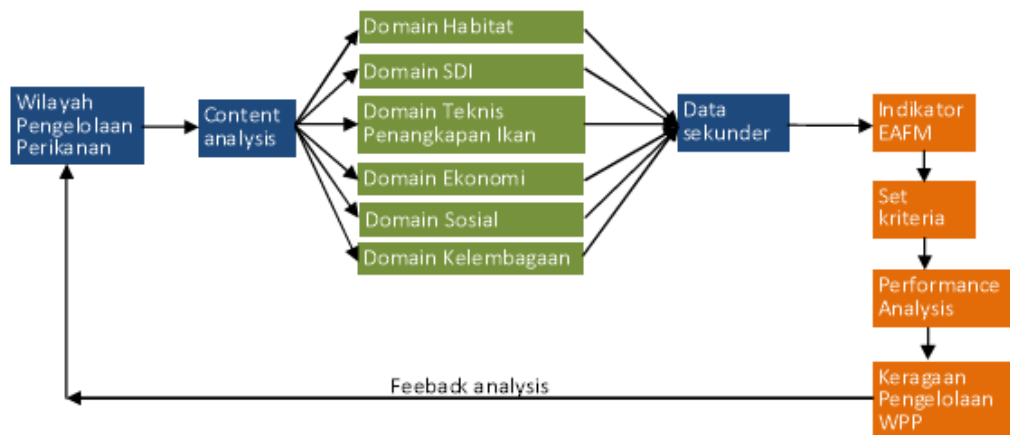
Perairan Laut Andaman. Daerah penangkapan dengan armada purse seine telah berkembang hingga ke lepas pantai hingga menjangkau bagian utara Selat Malaka (Timur Aceh), perbatasan Malaysia, hingga perairan Natuna. Daerah penangkapan dengan pukat ikan mencapai lebih dari 12 mil, dengan kedalaman 40-60 m. daerah penangkapan pukat apung yang berbasis di Tanjungbalai adalah perairan di sekitar pulau-pulau sekitarnya dengan kedalaman 30-50 m. Status pengusahaan ikan demersal dan udang sudah *over fishing* karena tak terkendalinya pukat ikan dan modifikasi trawl, dan kapal yang diduga illegal. Ikan pelagis kecil sudah dalam tahap fully exploited, akibat banyaknya kapal purse seine dan kapal ilegal. Sedangkan tingkat pengusahaan ikan pelagis besar belum bisa ditetapkan karena sifat ikan yang beruaya jauh. Dengan demikian dibutuhkan suatu kajian potensi wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan penelitian dibatasi dengan pokok permasalahan antara lain: (1) Bagaimana pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara, dan (2) Bagaimana pengelolaan SDI dan upaya

perbaikan pengelolaan. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi potensi yang ada di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara dan memberikan gambaran kondisi sumberdaya perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) 571 Selat Malaka Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dimana kajian yang ditinjau dari perspektif pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan. Kajian pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan dilakukan dengan menggunakan pendekatan *content analysis*, di mana kajian difokuskan pada isi (*content*) keragaan pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP) dan kemudian dioverlay dengan indikator yang telah dikembangkan sebelumnya. Adapun indikator yang digunakan adalah indikator habitat, indikator sumberdaya ikan, indikator teknis penangkapan ikan, indikator ekonomi, indikator sosial, dan indikator kelembagaan. Secara diagramatik, pendekatan studi dapat dilihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Kerangka Kajian Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan

Sementara itu, analisa data dilakukan dengan menggunakan pendekatan *multi-criteria analysis* (MCA) di mana sebuah set kriteria dibangun sebagai basis bagi analisis keragaan wilayah pengelolaan perikanan dilihat dari pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan melalui pengembangan indeks komposit. Dalam kajian pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan *content analysis*, dengan demikian memiliki keterbatasan yang terkait dengan pengumpulan data yang hanya didasarkan pada sumber data sekunder dan dengan data yang bersumber pada skala administratif di tingkat propinsi. Dalam konteks ini maka diperlukan kehati-hatian dalam membaca hasil

sintesis dan kesimpulan dari kajian ini. Lebih lanjut diperlukan kajian yang lebih komprehensif dengan melibatkan sumber-sumber primer dan skala kajian yang lebih detail pada skala administratif di tingkat kabupaten untuk meningkatkan ketajaman data keragaan pengelolaan perikanan di wilayah pengelolaan perikanan (WPP).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Satuan wilayah pengelolaan perikanan diatur melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1 tahun 2009 tentang Wilayah Pengelolaan Perikanan. Secara spasial, WPP di Indonesia dibagi menjadi 11 wilayah yang terbentang dari perairan Selat Malaka hingga Laut Arafura (Gambar 2).



Gambar 2. Peta Wilayah Pengelolaan Perikanan di Indonesia

Wilayah Pengelolaan Perikanan 571 meliputi wilayah perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. Secara administrasi WPP 571 di sebelah utara berbatasan dengan batas terluar ZEE Indonesia - Thailand, ZEE Indonesia - Malaysia, ZEE Indonesia - India; di sebelah barat berbatasan dengan Kab. Pidie-Kab. Aceh Besar; di sebelah selatan berbatasan dengan Kab. Siak dan Kab. Palalawan, Prov. Riau; dan di sebelah timur berbatasan dengan Kab. Bengkalis - Kab. Kampar. Secara umum, WPP 571 di sebelah utara berbatasan dengan batas

terluar ZEE Indonesia - India; di sebelah timur berbatasan dengan titik temu antara batas terluar ZEE Indonesia - India dengan ZEE Indonesia - Thailand ditarik ke arah Selatan menyusuri batas terluar ZEE Indonesia - Malaysia di Selat Malaka hingga batas laut laut Indonesia - Singapura; di sebelah selatan berbatasan dengan selanjutnya ditarik garis kearah Barat menyusuri pantai Selatan Kab. Bengkalis hingga Perbatasan antara Kab. Palalawan dan Kab. Siak, Prov. Riau, melewati titik Tenggara terluar P. Rangsang dan P. Rupat; di sebelah barat

berbatasan dengan perbatasan antara Kab. Palalawan dan Kab. Siak, Prov. Riau, ditarik garis menyusuri pantai Timur pulau Sumatera hingga batas antara Kota Banda Aceh dan Kab. Aceh Besar menuju mauduru di P. Weh, Kota Sabang, lalu menyusuri pantai bagian Timur hingga Ujung Bau di titik paling Utara pulau tersebut yang diteruskan dengan menarik garis ke arah Selatan tanjung terluar P.

Nicobar besar hingga batas terluar ZEE Indonesia - india.

Dari hasil analisis komposit untuk indikator habitat (Tabel 2) menunjukkan kondisi habitat di dalam WPP 571 ini tergolong sedang (skor 213) dengan areal tutupan terumbu karang yang rendah, rentan terhadap pencemaran perairan, namun baik dalam produktifitas estuari dan mempunyai level sedimentasi yang rendah.

Tabel 1. Analisis Komposit Habitat

No	Indikator Habitat	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
1	Pencemaran perairan	Selat Malaka rentan thd pencemaran	12,5	2	25	
2	Status lamun	Luasan dan tutupan lamun sedang di bagian utara Sumatera	12,5	2	25	
3	Status mangrove	Luasan mangrove sedang di bagian utara Sumatera, dengan INP sedang	12,5	2	25	
4	Status terumbu karang	Tutupan coral rendah <25%, dan keanekaragaman karang rendah	12,5	1	12,5	
5	Status dan produktivitas estuaria	Banyak sungai besar dengan prosuktifitas tinggi di bagian muaranya	12,5	3	37,5	
		Laju sedimentasi rendah	12,5	3	37,5	
6	Habitat penting (spawning ground, nursery ground, feeding ground)	Terdapat beberapa habitat penting yang perlu dilindungi	12,5	2	25	
7	Perubahan iklim terhadap SDI dan nelayan	Beberapa tempat terdapat coral bleaching, Aceh misalnya	12,5	2	25	
			100	17	213	

Sumber : Analisis Data (2013)

Hasil analisis komposit untuk indikator sumberdaya ikan yang diterapkan untuk WPP 571 dapat dilihat bahwa kondisi sumberdaya ikan termasuk dalam kategori baik dengan

indeks komposit 214. Tingkat kematangan gonad yang tertangkap mendapat nilai yang paling rendah pada indikator ini, sedangkan skor yang tertinggi yaitu indikator spesies.

Tabel 2. Analisis Komposit Sumberdaya Ikan

No	Indikator Sumberdaya Ikan	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
1	Sebaran ukuran ikan	Asumsi: d50% (tinggi badan dimana 50% tubuh ikan tertahan dimata jaring) harus proporsional dengan ukuran mata jaring.	14,29	2	28,5 7	
2	Komposisi spesies dan Tropic level	Hasil tangkapan utama jumlahnya lebih besar dari <i>by catch</i>	14,29	3	42,8 6	
3	Tingkat Kematangan gonad	TKG ikan yang tertangkap rata-rata TKG II dan III.	14,29	1	14,2 9	
4	Densitas/Biomassa untuk ikan karang & invertebrata	Sebagian wilayah sudah terdegradasi.	14,29	2	28,5 7	
5	Indikator spesies	Hasil tangkapan didominasi oleh ikan kembung	14,29	3	42,8 6	
6	Trend CPUE	Di perairan Selat Malaka, kondisi perikanannya hampir mengalami <i>overexploited</i>	14,29	2	28,5 7	
7	Waktu tempuh ke lokasi penangkapan ikan		14,29	2	28,5 7	
			100	15	214	

Sumber : Analisis Data (2013)

Berdasarkan penilaian indikator teknis penangkapan ikan (Tabel 3), kondisi WPP 571 termasuk dalam kategori sedang dengan total nilai 183. Skor terendah dalam indikator ini adalah terjadinya *overfishing* yang diyakini karena *overcapacity* oleh pengusaha ikan, dimana stok ikan pelagic pada tahap *full exploited*. Selain

itu, adanya penggunaan bom dan potasium yang cukup tinggi juga menunjukkan teknis penangkapan ikan yang buruk di WPP 571. Jika dilihat dari perizinan sertifikat awak kapal, umumnya awak kapal yang beroperasi di sekitar WPP 571 sudah memiliki sertifikat.

Tabel 3. Analisis Komposit Teknis Penangkapan Ikan

No	Indikator Teknis Penangkapan Ikan	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
1	Fishing Capacity	Status perusahaan ikan demersal & udang melampaui daya dukung (<i>overfishing</i>) dan perusahaan ikan pelagic kecil (<i>full exploited</i>) (BRKP, 2007). <i>Overfishing</i> terjadi diyakini karena	16,67	1	16,67	

No	Indikator Teknis Penangkapan Ikan	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
		Overcapacity.				
2	Selektivitas alat tangkap	Penggunaan pukat cincin (purse seine) dg ukuran mata jaring 1 inchi dominan (2.875unit) dan menurunkan stok ikan pelagic kecil pada tahap full exploited. Pukat ikan (fish net) (595), trawl/dogol (1252), purse sein (2875). Sedangkan rata-rata penggunaan scra nasional, pukat ikan (376), dogol (813) dan purse seine (677). Jd penggunaan alat tngkap di atas rata2 (>75%)	16,67	2	33,33	
3	Metode penangkapan ikan yang bersifat destruktif dan atau ilegal	Penggunaan bom, potasium cukup tinggi di Riau, Aceh dan Sumut. Indikasinya, kondisi Terumbu Karang di pesisir Sumatera, Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Sulawesi & utara Papua, (< 25%) dlm kondisi sangat buruk. Hanya 5.47% (sgt baik), 27,56% (baik) (LIPI, 2008). Penyebab kerusakan terbesar TK disinyalir berasal dari aktivitas pengeboman	16,67	1	16,67	
4	Kesesuaian fungsi dan ukuran kapal penangkapan ikan dengan dokumen legal	Terjadi peningkatan armada tangkap dari skala kecil ke arah menengah dan besar, khususnya pada ukuran 10-30 GT (2007-2008) dg alat tangkap dominan pukat cincin dan trawl (BRKP, 2007)	16,67	2	33,33	
5	Modifikasi alat penangkapan ikan dan alat bantu penangkapan	Pemanfaatan pukat ikan tinggi dan berkembangn modifikasi alat tangkap yg diklasifikasikan sbg trawl (BRKP, 2007). Penggunaan dogol (hasil modifikasi) mencapai 1.252 unit. Jumlah ini di bawah rata-rata nasional (semua WPP) yaitu 5378	16,67	2	33,33	
6	Sertifikasi awak kapal	Jumlah kepemilikan	16,67	3	50,00	

No	Indikator Teknis Penangkapan Ikan	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
	sesuai dengan peraturan	sertifikat cukup tinggi	100	11	183	

Sumber : Analisis Data (2013)

Dilihat dari indikator ekonomi (Tabel 4), kondisi WPP 571 termasuk dalam kategori buruk dengan nilai komposit 125. Hal ini ditunjukkan dari rendahnya pendapat rumah tangga, rendahnya nilai tukar nelayan, dan *saving rate* nelayan. Sehingga secara vaktual kondisi ekonomi nelayan yang beroperasi di sekitar WPP 571 masih tergolong rendah.

Tabel 4 . Analisis Komposit Ekonomi

No	Indikator Ekonomi	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
1.	Pendapatan rumah tangga (RTP)	UMR rata-rata = IDR 965,000/bulan; Income rata-rata : IDR 400-650,000/bulan (BRKP, 2009)	25	1	25	
2.	Nilai Tukar Nelayan (NTN)	NTN Rata-rata WPP-1 berkisar antara 80-99	25	1	25	
3.	Saving Rate	Berdasarkan data BRKP (2008), rata-rata rasio tabungan terhadap income sekitar 30-45 %	25	1	25	
4.	Kepemilikan aset	Diperkirakan peningkatan asetnya antara 50-100 %	25	2	50	
			100	5	125	

Sumber: Hasil Analisis Data (2013)

Untuk indikator sosial (Tabel 5), dapat dilihat bahwa WPP 571 termasuk dalam kategori baik. dengan total nilai komposisi sebesar 233. Kategori baik ini ditunjukkan dari adanya *traditional ecological knowledge* yang dipahami dan dilaksanakan oleh para nelayan sebagai tradisi. Selanjutnya tingkat keterlibatan masyarakat dalam kegiatan sosial juga cukup tinggi. Walaupun masih dijumpai konflik horizontal antara sesama nelayan di WPP 571, namun intensitas konflik tersebut tidak dalam jumlah yang tinggi.

Tabel 5. Analisis Komposit Sosial

No	Indikator Sosial	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
1.	Partisipasi pemangku kepentingan	Menurut survey BRKP (2008), tingkat partisipasi masyarakat nelayan adalah 50-100%	33,33	2	66,67	
2.	Konflik perikanan	Banyak terjadi konflik khususnya antara nelayan andon dan nelayan lokal, juga antara nelayan jaring	33,33	2	66,67	

		batu dan lampara di Provinsi Riau			
3.	Pengetahuan lokal dalam pengelolaan sumberdaya ikan (termasuk didalamnya TEK = traditional ecological knowledge)	Ada TEK	33,33	3	100
			100	7	233

Sumber: Hasil Analisis Data (2013)

Untuk aspek kelembagaan, terdapat 7 indikator yang dijadikan basis untuk penilaian keragaan EAFM yaitu (1) keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan; (2) tingkat sinergi kelembagaan dan kebijakan dalam pengelolaan perikanan; (3) upaya peningkatan kapasitas pemangku kepentingan; (4) mekanisme kelembagaan; (5) kelengkapan aturan main pengelolaan perikanan; (6) rencana pengelolaan perikanan; dan (7) kepatuhan terhadap aturan formal dan informal dalam pengelolaan perikanan. Seperti halnya aspek ekonomi dan aspek sosial, aspek kelembagaan untuk

WPP 571 bervariasi tergantung dari kinerja pengelolaan perikanan pada WPP.

Dalam upaya untuk meningkatkan peran kelembagaan lokal, maka terdapat dua prioritas program yang dilaksanakan yaitu membentuk kelompok usaha bersama bagi istri nelayan, dan kedua adalah memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan. Dari kedua prioritas program tersebut, memberikan pelatihan diversifikasi usaha pengolahan ikan yang paling sering dilakukan.

Tabel 6. Analisis Komposit Kelembagaan

No	Indikator Kelembagaan	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
1.	Keberadaan otoritas tunggal pengelolaan perikanan	Berdasarkan data sekunder, dalam pengelolaan perikanan paling tidak ada unsur dinas teknis dan organisasi nelayan seperti HNSI, Kelompok Nelayan dan lain sebagainya	11,11	2	22,22	
2.	Tingkat sinergisitas kebijakan dan kelembagaan pengelolaan perikanan	Diperkirakan ada peningkatan namun tidak signifikan	11,11	2	22,22	
		Masih belum ada sinergi	11,11	2	22,22	

No	Indikator Kelembagaan	Unit Data	Bobot	Skor	Nilai	Flag
		kebijakan dalam pengelolaan perikanan				
3.	Peningkatan kapasitas Pemangku kepentingan	Sudah banyak peningkatan kapasitas namun belum berfungsi sebagaimana mestinya	11,11	2	22,22	
4.	Mekanisme Kelembagaan	Belum ada mekanisme kelembagaan	11,11	1	11,11	
5.	Kelengkapan aturan main Dalam pengelolaan perikanan	Aturan main sudah ada namun belum lengkap	11,11	2	22,22	
		Sudah ada penegakan aturan main namun belum efektif	11,11	2	22,22	
6.	Rencana pengelolaan perikanan	Adanya RPP	11,11	1	11,11	
7.	Kepatuhan terhadap prinsip-prinsip perikanan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan perikanan yang telah ditetapkan baik secara formal	Masih banyak ditemukan pelanggaran misalnya terkait dengan ukuran kapal	11,11	1	11,11	
Jumlah			100	15	167	

Sumber: Hasil Analisis Data (2013)

Dari hasil analisis komposit tematik yang telah dilakukan untuk setiap aspek pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, tahapan selanjutnya adalah mengestimasi keragaan agregat wilayah pengelolaan perikanan dengan menggunakan teknis komposit antar tematik. Hasil estimasi

tematik masing-masing aspek kemudian digabung menjadi satu indeks dengan asumsi tidak ada perbedaan bobot masing-masing aspek. Dengan kata lain, dalam analisis agregat seluruh aspek dianggap penting. Hasil analisis komposit agregat selengkapnya dapat dilihat pada Tabel 9 berikut ini.

Tabel 9. Indeks Komposit Agregat Indikator EAFM Untuk WPP 571

No	Indikator	Nilai Komposit	Flag	Keterangan
1.	Habitat	213		Baik
2.	Sumberdaya Ikan	214		Baik
3.	Teknis Penangkapan Ikan	183		Sedang
4.	Ekonomi	125		Buruk

5. Sosial	233		Baik
6. Kelembagaan	167		Sedang
Total Rata-Rata	189		Sedang

Sumber: Hasil Analisis Data (2013)

Dari tabel tersebut diatas, dapat dilihat bahwa di WPP 571 apabila dilihat dari konteks pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan masih tergolong dalam kondisi sedang (nilai indeks 150-200). Secara agregat, terdapat 3 indikator yang masuk dalam kategori baik yaitu indikator habitat, sumberdaya ikan dan sosial. selanjutnya 2 indikator masuk kategori sedang yaitu indikator teknis penangkapan ikan dan kelembagaan, sedangkan 1 indikator masuk kedalam kategori buruk yaitu indikator ekonomi.

KESIMPULAN

Dari hasil analisis komposit tematik yang telah dilakukan untuk setiap aspek pendekatan ekosistem dalam pengelolaan perikanan, tahapan maka dapat disimpulkan beberapa hal penting sebagai berikut :

1. Indikator pengelolaan perikanan dengan pendekatan ekosistem bisa digunakan untuk melakukan penilaian terhadap keragaan pengelolaan berbasis wilayah yang sudah ada.
2. Berdasarkan analisis tematik habitat masuk kedalam kategori baik dengan nilai komposit 213; sedangkan untuk tematik sumberdaya ikan masuk kedalam kategori baik dengan nilai komposit 214. Sementara itu, untuk tematik teknis penangkapan ikan masuk kedalam kategori sedang dengan nilai komposit 183. Untuk tematik ekonomi masuk kedalam kategori buruk dengan nilai komposit 125. Untuk tematik sosial masuk kedalam kategori baik dengan nilai komposit 233. Untuk tematik kelembagaan masuk kedalam kategori sedang dengan nilai komposit 167.

3. Secara spasial, dapat disimpulkan bahwa keragaan EAFM di WPP 571 dapat digolongkan sebagai kategori sedang dengan skor agregat 189. Hal ini lebih banyak dipengaruhi oleh keragaan ekonomi yang relatif rendah namun memiliki keragaan sedang untuk tematik yang lain. Secara horisontal, dalam konteks EAFM kekuatan utama WPP ini terletak pada indikator tematik sosial yang relatif lebih baik dibandingkan indikator tematik lain di WPP ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianto, L. 2010. Konsep Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan. Kertas Kerja disampaikan pada Workshop Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan. Bogor , 22-23 September 2010.
- Adrianto, L. et.al. (eds). 2010. Laporan Lokakarya Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan. Direktorat Sumberdaya Ikan, Ditjen Perikanan Tangkap, KKP, WWF-Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan, IPB.
- Adrianto, L. 2007. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Perikanan Skala Kecil. Bappenas RI.
- Anonim. 2010. Penelitian Kualitatif. Tersedia pada : http://id.wikipedia.org/wiki/Penelitian_kualitatif.
- Azwar, Saifuddin. 2004. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.

- Charles, A.T. 2001. Sustainable fishery system. Blackwell Scientific Publications. Oxford. UK
- Cochrane, K. L. 2002. Fisheries management. In A Fishery Manager's Guidebook. Management Measures and their Application.1e20. Ed. by K. L. Cochrane. FAO Fisheries Technical Paper, 424. 238 pp.
- Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan. 2011. Peta Keragaan Perikanan Tangkap Di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia (WPP-RI). Jakarta: Direktorat Sumberdaya Ikan, Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- FAO. 2003. Ecosystem Approach to Fisheries. FAO Technical Paper.
- Gracia, S.M. and Cochrane, K.L 2005. Ecosystem Approach to Fisheries : A Review of Implementation Guidelines. ICES Journal of Marine Sciences (62).
- Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Kep.45/Men/2011 Tentang Estimasi Potensi Sumber Daya Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia.
- Nurhakim, Subhat, dkk. 2007. Wilayah Pengelolaan Perikanan, Status Perikanan Menurut Wilayah Pengelolaannya. Jakarta: Pusat Riset Perikanan Tangkap, Departemen Kelautan dan Perikanan.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan.
- United Nations. 2004. World Summit on Sustainable Development (WSSD) Johannesburg 2002, Plan of Implementation, Chapter IV no 30 (d). Diakses pada halaman http://www.un.org/esa/sustdev/documents/WSSD_POI_PD/English/POIChapter4.htm
- Ward, T., Tarte, D., Hegerl, E., dan Short, K. 2002. Policy Proposals and Operational Guidance for Ecosystem-Based Management of Marine Capture Fisheries. World Wide Fund for Nature Australia
- WWF-Indonesia dan Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan Institut Pertanian Bogor. 2011. Kajian Awal Keragaan Pendekatan Ekosistem Dalam Pengelolaan Perikanan (Ecosystem Approach to Fisheries Management) di Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia. WWF dan PKSPL IPB Report. Jakarta